STRATEGI PEMECAHAN PENGANGGURAN DI TENGAH KRISIS GLOBAL

Oleh:

Dra. Dwi Prawani Sri Rejeki, MSi. Drs. R. Djoko Hartono, MM. Dosen Pada STIE Semarang

Abstrak:

Diperkirakan pengangguran pada tahun 2009 akan meningkat tajam seiring belum pulihnya krisis global sejak tahun 2008, dan bahkan diprediksikan jumlahnya jauh lebih besar daripada yang terjadi tahun 2008. Terlebih di kalangan dunia usaha Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri masih menyisakan persoalan. Tulisan berikut ini akan mengupas tentang pengangguran sebagai dampak dari krisis global dan strategi pemecahannya.

Kata-kata kunci: Strategi pemecahan, Pengangguran, Krisis Global.

A. Pendahuluan

Belum berakhirnya krisis global yang terjadi pada tahun 2008 dan masih dipersoalkannya Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) Menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan yang bertajuk tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi pereknomian menjadikan global kondisi ketenagakerjaan Indonesia mengalami tekanan secara beruntun.

Di satu sisi, sebagaimana kita ketahui bahwa krisis global yang dimulai sejak tahun 2008, diyakini pada tahun 2009 masih menggelayuti pereknomian Indonesia dan bahkan dampaknya diprediksi akan lebih hebat. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia yang memperkirakan bahwa pereknomian global akan berada pada jurang resesi.

Bahkan prediksi mereka selalu direvisi setiap dua bulan dan selalu

lebih pesimistik dari angka sebelumnya. Beberapa ekonom seperti Bradford DeLong memperkirakan negarabahwa negara maju akan mengalami depresi cukup parah. Meski krisis tahun 2008 berbeda dengan krisis pada tahun 1998 lalu, namun dampak yang harus mendapatkan perhatian agar tidak terjadi instabilitas yaitu terhadap ancaman teriadinya pengangguran akibat **PHK** (Pemutusan Hubungan Kerja) yang bersumber dari bangkrutnya atau ambruknya perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Diperkirakan akan ada satu juta pengangguran baru yang tercipta oleh krisis, dengan perkiraan. 300 ribu diantaranya berasal dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dipulangkan dari Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea dan Singapura. Lima Negara tersebut merupakan Negara diperkirakan paling parah dilanda krisis (Suara Merdeka, 23 Desember 2008).

Di sisi lain, SKB empat menteri yang sampai saat ini masih dipersoalkan oleh **APINDO** (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Serikat Pekerja diperkirakan juga berdampak pada akan meskipun berskala kecil. Di dalam tersebut telah diatur SKB bahwa kisaran upah ditetapkan, langsung diserahkan minimum antara pengusaha dan pekerja. Dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur tangan di dalam menentukan besaran pekerja. minimum Jika upah sebelumnya di dalam menentukan besaran upah minimum ditetapkan oleh Tripartit yang terdiri pemerintah, pengusaha dan pekerja. dengan berlakunya Maka tersebut, upah hanya ditentukan oleh yaitu hanya Bipartrit antara pengusaha dengan pekerja.

Kondisi inilah yang ditakuti oleh para pekerja, karana dalam penentuan upah oleh Tripartit saja masih dilanggar pengusaha, apalagi penetapan upah hanya ditentukan oleh Bipartrit. Padahal jika para pekerja menolak maka ancamannya adalah PHK. Dan PHK jelas akan menambah daftar jumlah pengangguran terbuka di Indonesia.

Angka perkiraan penganggur sebesar satu juga penganggur yang tercipta akibat krisis global tersebut belum termasuk penganggur dari sumbangsih perguruan tinggi atau pengangguran intelektual yang berjumlah 400 ribu lebih penganggur atau sekitar 4,86%. Meskipun secara prosentasi angka tersebut tergolong kecil namun bila dilihat dari jumlah lulusan per tahun yang dihasilkan 81 dan 2236 **PTS** seluruh PTN Indonesia pada tahun 2006 sebesar 600 ribu, maka angka tersebut terbilang (Fauzan, sangat besar 2005:122).

Padahal dengan pertumbuhan 6,2% belumlah dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada Indonesia. Karena setiap pertumbuhan 1%, tenaga kerja yang terserap hanya berkisar 300 – 400 ribu orang. Artinya, pertumbuhan 6,2% hanya mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 1,8 – 2 juta orang penganggur. Oleh karena itu pertumbuhan harus lebih tinggi lagi dari 6,2% (Suara Merdeka. Januari 2006).

B. Permasalahan

Dengan kondisi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran.
- 2. Bagaimana implikasi pengangguran terhadap pembangunan nasional serta strategi apa yang akan diterapkan untuk memecahkannya di tengah krisis global.

C. Pembahasan

Bagaimana sifat dan bentuknya, apakah terbuka ataupun tersembunyi, pengangguran merupakan beban, baik bagi pemerintah maupun si penganggur itu sendiri. Salah satu faktor yang sumbangsih memberikan terjadinya pengangguran antara lain yang utama adalah terjadinya krisis global dengan ditandai kebrangkutan perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor dan berdampak pada PHK serta adanya daya tarik, bekerja di kota lebih menjanjikan menjamin masa depan serta

kehidupan lebih baik dibandingkan apabila tetap bertahan di desanya.

Ledakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari pekerjaan dengan tidak diimbangi ketrampilan memadai, menjadikan kota sebagai tumpukan pengangguran, yang pada akhirnya memunculkan daerah 'slum' atau daerah kumuh(dengan mendirikan emplek-emplek atau bangunan liar di daerah hijau/ larangan, bahkan ada yang sudah sampai menggerus sebagian badan sungai).

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Konsep angkatan kerja sebagaimana yang disarankan oleh ILO (International Organization) membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya penduduk usia kerja dibedakan menjadi pula kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Terkait dengan konsep tersebut di atas, rincian atas definisi dimaksud, sebagaimana akan dipaparkan di bawah ini :

- a. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- b. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- c. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)

- yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.
- d. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- e. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja, adalah keadaan seseorang yang memiliki pekejraan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja, karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panenan, mogok dan sebagainya (Sakernas 2003).

Di Indonesia dan negara sedang berkembang lainnya, tidak menghadapi masalah pengangguran terbuka di bidang ketenagakerjaan, tetapi menghadapi pula masalah setengah penganggur. Dari kedua masalah ketenagakerjaan tersebut, masalah pengangguran terbuka tidaklah lebih serius bila dibandingkan dengan masalah setengah penganggur. Berdasarkan hal itu, perlu dipahami terlebih dahulu konsep pengangguran terbuka dan setengah penganggur.

Konsep pengangguran terbuka dan konsep setengah penganggur merujuk pada dua situasi yang berbeda. Perbedaan antara keduanya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Konsep pengangguran terbuka merujuk pada situasi / keadaan dimana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja.

b. Konsep setengah penganggur merujuk pada situasi di mana pekerjaan yang dilakukan seseorang, dengan memperhatikan ketrampilan dan pengalaman kerja orang bersangkutan, tidak memenuhi aturan-aturan atau norma-norma pekerjaan yang telah ditetapkan.

Dari kedua konsep tersebut, terungkap bahwa pengangguran terbuka merupakan keadaan seseorang mengalami hambatan di usahanya dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih lanjut berdasarkan faktorfaktor menimbulkannya, pengangguran terbuka dapat dikelompokkan menjadi 3 diantaranya:

a. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian.

Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksinya. Dalam pelaksanaannya, hal itu berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak dipakai dan sebagian tenaga keria dihendikan. Dengan demikian kemunduran ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran.

b. Pengangguran struktural, diasumsikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Peranan perekonomian dalam jangka panjang, misalnya

akan meningkatkan peranan sektor industri pengolahan dan mengurangi kegiatan pertambangan dan pertanian. industri-industri rumah tangga serta industri kecil akan mengalami kemunduran digantikan oleh kegiatan industri yang menghasilkan barang yang sama, tetapi memakai peralatan lebih modern. Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi dapat menimbulkan pengangguran yang dinamakan pengangguran struktural.

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan pengangguran struktural yaitu sebagai akibat dari kemerosotan permintaan dan sebagai akibat semakin modernya teknik memproduksi

Pengangguran normal, kondisi ini terjadi bukanlah sebagai akibat ketidakmampuan dari mendapatkan pekerjaan. sebagai terjadi akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Apabila perekonomian mencapai masa bum (kemakmuran) dan tingkat pengangguran adalah sangat rendah, para pengusaha akan menghadapi kesulitan mendapatkan pekerja baru. Dalam situasi seperti ini. segolongan tenaga kerja akan meninggalkan kerjanya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih baik masa depannya memberikan pendapatan serta tinggi (Sukirno, yang lebih 1997:294).

Sedangkan di sisi lain, setengah penganggur merupakan keadaan seseorang yang telah bekerja, tetapi

mengalami ketidakpuasan atas pekeriaan dilakukannya. yang ketidakpuasaan Karena unsur dalam sebagaimana tercermin konsep setengah penganggur, maka konsep setengah penganggur mengandung pengertian cukup luas dan lebih laniut dibedakan meniadi dua, yaitu:

- a. Setengah penganggur kentara, yang mencerminkan adanya ketidakcukupan dalam volume pekerjaan dan,
- b. Setengah penganggur tidak kentara, yang mencerminkan sumberadanya penempatan daya manusia atau sumber adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan faktor-faktor produksi. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, ketrampilan vang kurang dimanfaatkan rendahnya dan tingkat produktivitas.

Agar pengertian konsep mudah dipahami, pengangguran sehingga memudahkan pula cara mengukurnya, maka perlu dilakukan operasionalisasi terhadap konsep tersebut. Untuk itu ILO telah definisi internasional menyusun tentang penganggur dan setengah penganggur kentara. Definisi tentang penganggur disusun berdasarkan tiga kriteria yaitu (1) tidak bekerja, (2) bersedia untuk bekerja dan (3) sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian penganggur didefinisikan sebagai seorang termasuk yang kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan. Orang yang tercakup dalam definisi disebut sebagai penganggur terbuka atau penganggur penuh. Sedangkan batasan setengah penganggur kentara disusun juga berdasarkan tiga kriteria, yaitu (1) bekerja kurang dari jam kerja normal, (2) melakukan pekerjaan secara terpaksa atau (3) masih mencari pekerjaan lain atau bersedia menerima pekerjaan lain/tambahan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik mendefinisikan penganggur terbuka atas 4 kriteria, antara lain:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha
- Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam kriteria tersebut, istilah mengenai bersedia menerima pekerjaan tidak dicantumkan, karena telah tersirat bahwa seseorang yang sedang mencari pekerjaan adalah orang yang bersedia menerima pekerjaan.

Sedangkan tentang batasan setengah penganggur, **BPS** menerima konsep baku ILO, namun dengan menghilangkan kriteria keterpaksaan, karena kriteria ini telah tercermin dari usaha untuk mencari pekerjaan lain atau menerima pekerjaan selain yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, konsep setengah penganggur dibedakan BPS menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Setengah penganggur terpaksa, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

b. Setengah penganggur sukarela, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan.

Istilah lain dari konsep pengangguran yang sering dijumpai di negara sedang berkembang, antara

lain:

tersembunyi, Pengangguran a. suatu apabila dalam yaitu kegiatan perekonomian, jumlah tenaga kerja sangat berlebihan, maka pengangguran tersembunyi dapat berlaku. Kelebihan tenaga pengangguran dan tersembunyi di sektor pertanian banyak berlaku di negara-negara sedang berkembang.

Pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu tahun. Biasanya satu pengangguran seperti ini berlaku pada waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Di dalam periode tersebut banyak diantara para petani dan tenaga kerja di sektor pertanian tidak melakukan pekerjaan, yang berarti mereka keadaan sedang dalam menganggur. Namun sifatnya pengangguran itu dan berlaku saja sementara dalam waktu - waktu tertentu.

c. Setengah menganggur, kondisi ini terjadi sebagai akibat tidak tertampungnya kaum urbanisasi yang berusaha mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar. Banyak diantara mereka yang harus menganggur dalam waktu yang lama. Di samping itu ada

mendapatkan pula yang pekerjaan, tetapi jam kerjanya setiap hari/minggu adalah jauh lebih rendah dari jumlah jam kerja yang seharusnya dilakukan seseorang dalam masa tersebut (7 atau iam sehari seminggu). Tenaga kerja yang bekerja dalam jumlah jam kerja vang terbatas itu tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai Tetapi mereka juga bekerja. penganggur. Oleh bukanlah sebab itu mereka digolongkan sebagai setengah penganggur, dan banyak dijumpai di sektor informal (Sukirno, Opcit:295).

Berdasarkan definisi dan kriteria tentang pengangguran sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai penganggur apabila mereka termasuk penduduk usia kerja (angkatan kerja) yang tidak bekerja atau tidak memiliki kesempatan untuk bekerja sedang mencari pekerjaan untuk Sedangkan tertentu. periode meskipun seseorang telah bekerja, namun pekerjaan yang dilakukan kurang dari 35 jam kerja per minggu vang masih mencari pekerjaan atau yangmasih bersedia menerima pekerjaan lain tetap dikategorikan penaggur setengah terpaksa. Dan apabila mereka bekerja di bawah 35 jam kerja per minggu namun tidak pekerjaan serta mencari bersedia menerima pekerjaan lain, digolongkan ke dalam setengah penganggur sukarela.

Adapun secara mendasar penyebab terjadinya pengangguran adalah karena terjadinya ketidakseimbangan antara faktorfaktor sebagai penyebab terjadinya pengangguran sebagaimana diketahui secara umum antara lain meliputi :

- a. Rendahnya tingkat pendidikan
- b. Rendahnya ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki.
- c. Tidak sebandingnya antara kerja dengan lapangan pekerjaan
- d. Terjadinya krisis ekonomi atau keuangan yang mengakibatkan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- e. Faktor-faktor lain (misalnya pilih-pilih pekerjaan)

Tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi akan yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menambah jumlah angkatan kerja secara otomatis. Yang dimaksud angkatan kerja adalah iumlah penduduk yang bekerja dan yang pekerjaan. Sedangkan mencari penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka yang tergolong penganggur (pencari kerja) tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja. Sebaliknya mereka yang bekerjapun sekian persennya juga dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur.

Selanjutnya untuk melihat realitas jumlah angka pengangguran berikut implikasinya terhadap pembangunan, berikut ini akan disajikan beberapa data hasil analisis Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2003 terkait dengan persoalan tersebut sebagai berikut:

Penduduk usia kerja
 Jumlah penduduk Indonesia
 berumur 15 tahun ke atas

menurut golongan umur dan pendidikan yang ditamatkan berjumlah 152.649.981 orang, dimana dari jumlah tersebut angka tertinggi diduduki oleh mereka yang menamatkan pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 90.384.166 orang atau 59,21%. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka sangatlah tingkat wajar jika lulusan pendidikan yang rendah memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap jumlah angka penangguran baik terbuka maupun setengah penganggur.

- Jumlah pengangguran terbuka Dari jumlah penganggur terbuka 9.531.090 sebesar orang, kontributor tertinggi tetap berasal dari mereka yang tamat SD dan SMP yaitu sebesar 4.704.565 orang atau 49,36%. Oleh karena itu apabila salah satu penyebab pengangguran terbuka sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan adalah sangat wajar. Mengingat jumlah lulusan SD **SMP** memberikan sumbangan sangat besar terhadap jumlah pengangguran terbuka.
- Jumlah setengah pengangguran Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang masuk golongan setengah penganggur adalah sebesar 28.467.106 orang, terdiri dari setengah penganggur sukarela sebesar 16.043.572 atau 56,36% setengah dan pengangguran terpaksa sebesar 12.423.534 orang atau 43,64%. Sumbangan paling besar untuk kedua kategori ini tetap diduduki oleh mereka yang hanya tamat SD dan SMP yaitu sebesar 16.741.753 orang atau 58,81%.

setengah jumlah Dari pengangguran sebesar 28 juta memberikan berpotensi jumlah terhadap sumbangan terbuka, pengangguran mengingat mereka bekerja tidak pada jam kerja normal (bekerja di bawah 35 jam per minggu). Sehingga waktu-waktu jumlah tersebut bisa berkurang dalam untuk waktu relative cepat berpindah menambah iumlah pengangguran terbuka.

Setelah mencermati data-data terkait dengan jumlah penduduk usia iumlah angkatan kerja, kerja, terbuka maupun pengangguran setengah maka pengangguran, selanjutnya akan dilihat apakah krisis global tersebut situasi implikasi terhadap memiliki pembangunan.

dikupas Sebagaimana telah dimuka, bahwa jumlah penduduk memiliki dua peranan pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi khususnya. Pertama, dari permintaan penduduk sebagai konsumen dan Kedua, dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan jalannya penghambat bagi pembangunan, jika penduduk ini memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan (Irawan, 1988:60). pertambahan Jadi penduduk dengan tingkat penghasilan akan rendah yang memiliki implikasi bagi pembangunan.

Berbeda dengan negara maju, bahwa pertambahan penduduk yang pesat justru menyumbang terhadap kenaikan penghasilan riil per kapita. Ini disebabkan karena negara yang siap maiu telah sudah akan melayani tabungan yang kebutuhan investasi. Tambahan penduduk justru akan menambah masyarakat untuk potensi dan juga sebagai menghasilkan permintaan yang Sementara bagi negara berkembang keadaannya justru terbalik, yaitu perkembangan penduduk vang cepat justru akan menghambat perekonomian dan pembangunan. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan kerja.

Adapun akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.

Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya.

b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah semakin sedikit. Dengan demikian pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan.

c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang pertama, tenaga buruh pengangguran kelebihan diikuti pula oleh mesin-mesin kapasitas perusahaan. Keadaan ini tidak menggalakkan mereka melakukan investasi di masa pengangguran datang. Kedua, diakibatkan kelesuan yang perusahaan kegiatan keuntungan menyebabkan berkurang. Keuntungan rendah mengurangi keinginan melakukan investasi. untuk Kedua hal tersebut tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Di samping itu, implikasi lain yang dapat dirasakan dengan tingginya angka pengangguran antara lain :

a. Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan

Di negara maju, mereka yang menganggur mendapat tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, sehingga mereka tidak tergantung pada Sedangkan pihak lain. negara berkembang, karena tidak tersebut, ada program kehidupan penganggur dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/bantuan keluarga dan kawan-kawan. Keadaan ini bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga tidak harmonis.

b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan ketrampilan

Pengangguran dalam periode yang lama akan menyebabkan tingkat ketrampilan pekerja menjadi semakin merosot atau bahkan menjadi hilang.

c. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. memerintah Golongan yang semakin tidak populer di mata masyarakat. Berbagai tuntutan dilontarkan dan kritik akan pemerintah kepada adakalanya disertai demonstrasi dan hura-hura. Kegiatan-kegiatan bersifat kriminal akan meningkat. (Sukirno, Op.cit. hal 297).

Dengan melihat pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka strategi berupa langkahlangkah untuk mengatasi atau memecahkan masalah pengangguran di tengah krisis global antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan Diversifikasi

Kebanyakan pelaku pasar masih membidik atau terbatas pada pasar otomotif untuk kawasan Timur Tengah dan Amerika Latin. Sementara produk ekspor yang akan digencarkan adalah suku cadang komponen otomotif. barang jadi Jika ekspornya ke kawasan itu ditambah, diharapkan produksi tidak terlalu turun. Di samping

itu diversifikasi lain yang perlu dilakukan adalah untuk jenis produk dari yang harganya tinggi ke produk yang lebih murah. Contoh penggunaan jok mobil dari kulit diganti ke bahan yang lebih murah.

2. Menanamkan jiwa kewirausahaan

sedang Pengangguran yang mengincar ribuan orang sebagai dampak dari krisis global seyogiyanya dijadikan campuk anak didik untuk memperbaiki diri. Maka ketika masih di bangku kuliah tidak ada salahnya iika membekali diri dengan berbagai ketrampilan. Sehingga ketika lulus mereka dapat membuka lapangan kerja dengan memanfaatkan sendiri ketrampilan yang diperoleh di kuliah bangku tanpa harus bergantung pada pihak lain.

3. Memberikan stimulus fiskal

Salah satu strategi munculnya mengantisipasi pengangguran sebagai dampak dari krisis global adalah berupa pengucuran stimulus di bidang fiskal. **Terkait** dengan tersebut pemerintah Indonesia telah menggelontorkan stimulus fiskal sebesar 50 triliun guna mencegah meluasnya dengan asumsi pengangguran, "kalau tidak ada stimulus, pertumbuhan Cuma 4,5% dan tingkat pengangguran 9.3%. Kami tingkatkan berusaha 5,5% pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran 7,9%," kata Menneg PPN/Bappenas Paskah Suzetta. (Suara Merdeka 7 Januari 2009)

4. Mendorong dan Membuka Kesempatan bagi Investor untuk Menanamkan Modalnya ke Indonesia

Memberi kesempatan kepada para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia bukan pekerjaan mudah dan ringan, karena para pemodal sering diliputi rasa keragu-raguan oleh karena ketidakstabilan politik, administrasinva sistem dan sistem hukumnya yang mungkin kurang mendukung, sehingga mereka kuatir, apakah modalnya dapat mereka peroleh apabila terjadi kembali instabilitas. Terhadap keraguan hal tersebut, yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a. Bahwa legitimasi pemerintah yang sedang berkuasa harus berada pada tingkat yang tinggi, karena legitimasi yang tinggi tersebut akan dapat menjamin kontinyuitas pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pemerintah harus dapat menciptakan iklim yang merangsang untuk penanaman modal. Artinya bahwa kepada para investor, baik yang riil maupun potensial harus diberi keyakinan bahwa modal yang mereka tanam memberikan keuntungan kepada mereka yang wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam di tempat lain.
- c. Pemerintah perlu memberikan jaminan kepada investor, bahwa dalam hal

terjadinya goncangan politik, maka modal mereka akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Pemerintah harus dapat menunjukkan tentang adanya kesungguhan dalam memperbaiki sistem administrasi, supaya agar dalam hubungannya dengan penanaman modal itu, maka permintaan izin dan lain-lain berkaitan pembinaan yang mengalami tidak usaha birokrasi yang perubahan negatif, akan tetapi harus dapat berjalan lancar dan memuaskan (Siagian, Op.cit, hal 66).

D. Penutup

Sebagai bagian dari tatanan ekonomi dunia, adalah sesuatu yang wajar apabila di belahan dunia lain terjadi krisis khususnya krisis keuangan, maka belahan dunia yang lain akan terkena dampaknya. Tak terkecuali dengan krisis ekonomi keuangan yang awalnya bersumber dari Amerika juga telah melanda Indonesia.

Meskipun berbeda dengan krisis yang pernah terjadi pada tahun 1998, namun krisis tersebut berdampak pada penciptaan pengangguran yang sangat hebat. Oleh karena itu perlu mindset kita, dalam ditanamkan walalupun pengangguran dapat ditanggulangi atau dipecahkan, namun akan lebih baik apabila sebelum terjadi atau kalau toh terjadi sampai berdampak tidak stabilitas nasional jikalau sejak dini sudah/berhasil diantisipasi dengan langkahberbagai strategi dan langkah konkrit, diantaranya dengan

- 1. Menanamkan jiwa kewirausahan
- 2. Melakukan diversifikasi usaha/ pasar
- 3. Mengucurkan stimulus bidang fiskal
- 4. Menciptakan investor baru dengan fasilitas dan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2003. Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Jakarta.
- Fauzan, 2005. Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Pengelolaan PTS, dalam Majalah Ilmiah Kopertis Wil. VI, Volume XV, No. 24.
- Irawan dan Suparmoko, 1988. **Ekonomi Pembangunan (Edisi keempat),** Liberty, Yogyakarta.
- Siagian, S.P., 1981. Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
 , Suara Merdeka tgl. 23 Desember 2008.
-, Suara Merdeka tgl. 7 Januari 2009.
- Sukirno, Sadono, 1997. **Pengantar Teori Makroekonomi (Edisi Kedua),** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.